

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA



KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 060/93/B.11/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA
TAHUN 2016-2021



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 060/ /B.11/2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan SKPD dalam menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan ini, menunjuk :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Utara melakukan perencanaan kinerja jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan review-nya;
 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara setiap tahun anggaran berakhir, dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Gubernur Bengkulu.

3. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SAKIP SKPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Bengkulu Utara dengan tembusan kepada Gubernur Bengkulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara menyusun Laporan Kinerja SKPD setiap tahun anggaran berakhir dan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja setiap awal tahun setelah dokumen pelaksanaan anggaran disusun dan disahkan. Laporan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja disampaikan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 23-01-2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

M I A N

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 060/93/B.11/2017
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	MISI		SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG ADIL DAN BERWIBAWA	1.	Terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah	1. Jumlah Pusat Pertumbuhan
				2. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik
		2.	Meningkatnya pemerataan dan keadilan layanan transportasi baik antar wilayah maupun antar golongan masyarakat di perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil	1. Kondisi jalan dalam keadaan baik
				2. Alokasi anggaran dalam APBD Pertahun dalam rangka perbaikan jalan kewenangan kabupaten.
		3.	Terwujudnya percepatan pembangunan di kawasan cepat tumbuh dan strategis, kawasan tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dengan daerah lain dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang berintegrasi dan sinergis	1. Jumlah regulasi yang mendukung percepatan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
		4.	Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten	1. ASN yang memiliki kompetensi teknis maupun manajerial
				2. Penempatan pejabat ASN Kabupaten berdasarkan kualifikasi pendidikan
				3. SKPD Kabupaten yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan
				4. Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan
5. Jumlah ASN dengan jenjang pendidikan S2				
5.	Meningkatnya proporsi alokasi anggaran belanja publik dalam APBD	1. Proporsi belanja untuk publik terhadap belanja APBD		
		2. Hasil musrembang RKPD di Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD		

	6.	Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan akuntabel dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini atas Audit Tahunan pengelolaan keuangan dan aset Badan Pemeriksa Keuangan 2. Implementasi penyelenggaraan SPIP berupa tingkat maturitas SPIP 3. Implementasi Penyelenggaraan SPIP berupa Tingkat Maturitas SPIP 4. Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 5. Hasil Penilaian SAKIP Pemerintah daerah
	7.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kriminalitas tertangani 2. Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk 3. Prosentase linmas yang ditingkatkan kemampuannya
	8.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah jenis data atau informasi yang ditayangkan dalam website Pemerintah Daerah 2. Permintaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terlayani 3. Tersedianya database dan sistem informasi teknologi terpadu dalam mendukung upaya keterbukaan informasi publik 4. Jumlah aplikasi elektronik/teknologi informasi yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
	9.	Membaiknya sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan luas tutupan lahan di luar kawasan 2. Indeks pengendalian pencemaran Air 3. Indeks pengendalian pencemaran Udara 4. Kota sehat/ adipura 5. Prosentase perusahaan yang telah menerapkan SOP/kaidah sistem pengelolaan SDA dan Lingkungan 6. Luas hutan kemasyarakatan yang dikelola

		10.	Pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable Development) diseluruh sektor di daerah, khususnya dalam pelaksanaan rencana pembangunan	1. Kegiatan pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan
		11.	Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif dalam penyerapan aspirasi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
		12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Prosentase penduduk yang telah memiliki KTP 3. Prosentase keluarga yang memiliki kartu keluarga 4. Prosentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 5. Jumlah pasangan yang memiliki akta nikah
		13.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		14.	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodrat sebagai perempuan	1. Prosentase perempuan yang duduk di jabatan Publik 2. Prosentase perempuan yang duduk di legislative
		15.	Menurunnya resiko akibat bencana alam	1. Desa tangguh bencana di daerah zona merah 2. Sekolah aman bencana 3. Indeks Resiko Bencana
2.	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR	1.	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan publik terutama bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan transportasi	1. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Angka Partisipasi Sekolah (7-12) tahun 3. Angka Partisipasi Sekolah (13-15) tahun 4. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 5. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK kondisi bangunan baik 6. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1000 penduduk)

			7. Persentase sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik
			8. Status Rumah Sakit Arga Makmur
			9. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
			10. Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan Kabupaten (desa)
			11. Prosentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi
			12. Prosentase desa yang belum teraliri listrik
			13. Prosentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan
			14. Persentase sarana dan prasarana jalan dalam kondisi baik
			15. Persentase sarana dan prasarana jembatan dalam kondisi baik
			16. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik
	2.	Meningkatnya mobilitas dan distribusi wilayah	1. Rata-rata kecepatan lalu lintas kendaraan Roda-4 di jalan kabupaten
	3.	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan di seluruh kawasan permukiman	1. Persentase Penduduk berakses air minum 2. Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)
	4.	Meningkatnya rasio kelistrikan	1. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
	5.	Meningkatnya jangkauan pelayanan komunikasi dan informasi	1. Jangkauan Penerima Frekuensi Siaran Publik Pemerintah Kabupaten
	6.	Tersedianya subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1. Jumlah rumah tidak layak huni 2. Terselenggarakannya bantuan stimulan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (komulatif)
	7.	Terwujudnya sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas	1. Jumlah permukiman kumuh 2. Perbaiki sarana dan prasarana kawasan kumuh perkotaan

3.	MEMBANGUN PELAYANAN MASYARAKAT	1.	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka Partisipasi Murni SD 3. Angka Partisipasi Murni SLTP 4. Angka Partisipasi Murni SLTA 5. Angka Partisipasi Kasar SD 6. Angka Partisipasi Kasar SLTP 7. Angka Partisipasi Kasar SLTA 8. Angka Putus Sekolah SD 9. Angka Putus Sekolah SLTP 10. Angka Putus Sekolah SLTA 11. APM PAUD 12. APK PAUD/SD/SMP 13. Guru SD/SLTP yang berpendidikan minimal S1 14. SD yang terakreditasi 15. SLTP yang terakreditasi 16. Jumlah desa yang belum memiliki SD 17. Jumlah kecamatan minimal memiliki 2 SLTP 18. Angka buta aksara 19. Tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki sertifikat
		2.	Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lulusan SMK dan lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
		3.	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seni budaya yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat 2. Jumlah sanggar seni /kelompok seni budaya daerah 3. Pembentukan Desa Adat 4. Penampilan seni budaya daerah dalam even tingkat daerah, regional atau nasional
		4.	Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Angka Kematian Bayi per 1000 penduduk (AKB) 2. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000
		5.	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi balita gizi kurang / underweight

		6.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan
			1. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
			2. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
			1. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1000 penduduk)
			2. Jumlah puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap
			3. Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas
			4. Jumlah desa tertinggal yang belum memiliki sarana kesehatan
			5. Presentase tahapan akreditasi RSUD
			6. Jumlah desa yang belum memiliki bidan desa
		8.	Meningkatnya Perlindungan Finansial Kesehatan
			1. Tingkat kepersertaan penduduk Kabupaten Bengkulu Utara dalam Program Jaminan Kesejahteraan Nasional
		9.	Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia kesehatan
			1. Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)
			2. Rasio dokter terhadap 3000 penduduk
			3. Rasio bidan terhadap 1000 penduduk
			4. Rasio perawat terhadap 1000 penduduk
			5. Rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk di Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Pinang Raya, Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Enggano.
		10.	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama
			1. Jumlah anggota majelis taklim/kelompok pengajian
			2. Jumlah majelis taklim/kelompok pengajian
			3. Jumlah Masjid/mushola

4.	MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN	1.	Terjaganya tingkat produksi pertanian dan perikanan di sentra-sentra produksi dengan tetap mendorong peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta meningkatnya konsumsi protein hewani berupa hasil ternak dan ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) berbasis komoditi lokal 2. Inovasi dan implementasi teknologi dalam peningkatan produksi pertanian/perikanan 3. Bidang Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur pertanian dan perikanan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik b. Skore pola pangan harapan c. Jumlah kelompok tani yang aktif d. Kelompok Tani yang mendapat bantuan permodalan e. Panjang jalan usaha tani yang dibangun f. Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi g. Panjang jalan sentra produksi yang dibangun h. Panjang jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya i. Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun j. Jumlah desa mandiri pangan k. Jumlah gapoktan untuk pengembangan packaging beras l. Panjang Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun m. Cetak sawah baru n. Produksi padi o. Produksi jagung p. Produksi kedelai q. Produksi Cabai Merah 4. Indikator bidang kelautan dan perikanan <ol style="list-style-type: none"> a. Konsumsi ikan b. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang aktif c. Jumlah unit pengolahan hasil perikanan d. Jumlah kelompok nelayan yang aktif e. Jumlah kampung nelayan yang dikembangkan f. Prosentase tahapan pengembangan pulau enggano sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara

		5. Indikator Bidang Peternakan
		a. Jumlah sentra peternakan rakyat (SPR)
		b. Produksi daging sapi
		c. Produksi daging kambing/domba
		d. Produksi daging unggas
		e. Produksi telur
		f. Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi
		6. Indikator Bidang Perkebunan
		a. Produksi Kelapa Sawit
		b. Produksi Karet
		c. Produksi Kakao
		d. Kelapa Dalam
		e. Kopi
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata melalui meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	1. Kunjungan wisata
		2. Berkembangnya pulau enggano sebagai destinasi wisata bahari
		3. Jumlah event promosi pariwisata
		4. Jumlah Rumah Makan/ Restoran pendukung pariwisata ketersediaan akses menuju obyek wisata
		5. Rencana Induk Pariwisata daerah
3.	Meningkatnya kinerja koperasi, lembaga keuangan mikro dan BUMDes dalam penyediaan permodalan bagi usaha ekonomi masyarakat	1. Persentase koperasi aktif
		2. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro
		3. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
		4. Jumlah BUMDes
		5. Fasilitasi pembentukan badan hukum
		6. Jumlah unit usaha koperasi yang mendapat bantuan stimulan dari stakeholder
4.	Meningkatnya peran serta BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa	1. Jumlah dana yang dikelola BUMDes
		2. Jumlah BUMDes

		5.	Meningkatnya nilai tambah produk usaha masyarakat serta meningkatnya lapangan kerja.	1. Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Utara 2. IKM yang mendapatkan pelatihan usaha 3. Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan pembiayaan 4. Jumlah IKM yang mengikuti promosi 5. Jumlah koperasi yang direvitalisasi 6. Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi 7. Status BLK Kabupaten Bengkulu Utara
5.	MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA	1.	Menurunnya sengketa ketenagakerjaan	1. Jumlah sengketa ketenagakerjaan 2. Jumlah Lembaga Hubungan Industri yang aktif
		2.	Meningkatnya kesempatan kerja	1. Jumlah bursa tenaga kerja per tahun 2. Jumlah wirausaha baru
		3.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Rasio lulusan S1/S2/S3 2. Jumlah lembaga pelatihan tenaga kerja 3. Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi 4. Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha 5. Status Balai Latihan Kerja (BLK) Arga Makmur
		4.	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
		5.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan	1. Jumlah organisasi kepemudaan/klub olah raga yang aktif 2. Kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) yang dibina dan dikembangkan 3. Pembangunan pusat kegiatan pemuda dan olah raga

		6.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2. Angka Kelahiran Total (TFR Total Fertility Rate) 3. Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate CPR) 4. Cakupan sarana prasarana, alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan KB dan jejaringnya 5. Rasio Akseptor 6. Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan

BUPATI BENGKULU UTARA,

M I A N

